

INOVASI CSBM MARITIM DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEAMANAN REGIONAL ASIA TENGGARA

Surya Wiranto

Indopacific Strategic Intelligence (ISI)

Suryawiranto1@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v912.191>

Abstrak

Tulisan ini mengkaji inovasi *Confidence and Security Building Measures* (CSBM) maritim sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan keamanan regional di Asia Tenggara. Kajian ini berangkat dari partisipasi penulis dalam workshop “*New Maritime CSBMs in Southeast Asia*” yang diselenggarakan oleh *Asia-Pacific Leadership Network* (APLN), serta analisis terhadap kecenderungan ancaman kontemporer seperti operasi zona abu-abu (*grey-zone operations*), klaim tumpang tindih *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE), dan kesenjangan kemampuan *Maritime Domain Awareness* (MDA). Artikel ini mengusulkan kerangka CSBM maritim generasi baru yang berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu: (1) sistem verifikasi aktivitas maritim secara *real-time* berbasis *Distributed Ledger Technology* (DLT); (2) protokol krisis maritim multilateral dengan mekanisme *hotline* dan *table-top exercise* (TTX) terstandar; serta (3) kerangka *Risk Reduction Measures* (RRM) yang terukur melalui peta batas patroli koersif dan zona pengecualian aktivitas militer. Rencana implementasi operasional dirancang untuk periode 2025–2027 dengan mencakup pembentukan tim penilaian risiko bersama, program peningkatan kapasitas, dan konsorsium berbagi data citra satelit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara teknologi verifikasi dan diplomasi preventif mampu mengurangi insiden jarak dekat (*close-quarters incidents*) sekaligus memperkuat ketahanan keamanan maritim kawasan.

Kata Kunci: Keamanan Maritim, Asia Tenggara, CSBM, Diplomasi Pertahanan, Inovasi Teknologi.

Abstract

This paper explores innovations in maritime Confidence and Security Building Measures (CSBMs) as a strategic response to evolving regional security challenges in Southeast Asia. The study draws upon the author's participation in the “New Maritime CSBMs in Southeast Asia” workshop organized by the Asia-Pacific Leadership Network (APLN), complemented by an analysis of contemporary threats such as grey-zone operations, overlapping Exclusive Economic Zone (EEZ) claims, and gaps in Maritime Domain Awareness (MDA). It proposes a next-generation maritime CSBM framework built upon three core pillars: (1) real-time verification of maritime activities utilizing Distributed Ledger Technology (DLT); (2) a multilateral maritime crisis protocol incorporating standardized hotline and table-top exercises (TTX); and (3) a measurable Risk Reduction Measures (RRM) framework including coercive patrol boundary mapping and military activity exclusion zones. The proposed implementation roadmap (2025–2027) includes establishing a joint risk assessment team, capacity-building initiatives, and a regional satellite imagery-sharing consortium. The findings highlight that the synergy between verification technologies and preventive diplomacy can significantly reduce close-quarters incidents and enhance the resilience of regional maritime security.

Keywords: Maritime Security, Southeast, CSBM, Defense Diplomacy, Technologi Innovation.

PENDAHULUAN

Tulisan ini disusun setelah penulis mengikuti kegiatan *New Maritime CSBMs in Southeast Asia Workshop TTX-1 and TTX-2* yang diselenggarakan oleh *Asia Pacific Leadership Network* (APLN) dan dihadiri oleh delegasi dari Indonesia (diwakili *Indonesian Strategic Initiative/ISI*), Malaysia, dan Filipina pada 19 Agustus 2025 secara daring. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya regional untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi *Confidence and Security Building Measures* (CSBM) maritim di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi eskalasi ancaman non-tradisional dan praktik *grey-zone operations* yang semakin meningkat di wilayah Indo-Pasifik.

Lokus latihan dan diskusi berfokus pada kawasan Asia Tenggara sebagai episentrum geopolitik Indo-Pasifik, yang kini menghadapi tekanan strategis paling intens dibandingkan kawasan lain. Sekitar 60% perdagangan laut global senilai USD 5,3 triliun per tahun melintasi *Sea Lanes of Communication* (SLOC) di Selat Malaka, Laut Sulu, dan Laut Cina Selatan. Jalur ini bukan hanya urat nadi ekonomi dunia, tetapi juga medan rivalitas kekuatan besar. Berdasarkan data UNCLOS 2024, sekitar 35% Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara di Asia Tenggara mengalami klaim tumpang tindih, menciptakan ketegangan diplomatik dan potensi konflik maritim yang kompleks.

Laporan ASEAN Maritime Outlook 2024 mencatat peningkatan signifikan,

yakni 140% insiden *grey-zone operations* sejak 2020, terutama di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Bentuk-bentuk operasi ini meliputi penggunaan *maritime militia* oleh Tiongkok di Mischief Reef, pelanggaran zona tangkap ikan di perairan Natuna oleh kapal Vietnam, hingga pendudukan fitur karang secara sepihak. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena tersebut diperburuk oleh aktivitas eksplorasi minyak ilegal di Blok Tuna oleh perusahaan Rusia Rosneft di Landas Kontinen Vietnam pada 2023, yang memicu ketegangan diplomatik multilateral antara Vietnam, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN.

Kawasan Asia Tenggara kini menghadapi kondisi yang oleh para analis strategis disebut sebagai “*regional maritime security dilemma*”, yaitu situasi di mana peningkatan kapabilitas pertahanan maritim oleh satu negara dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga memicu perlombaan senjata (*arms competition*) dan meningkatkan risiko miskalkulasi strategis. Berbagai upaya mitigasi seperti *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES) dan *ASEAN Maritime Forum* (AMF) memang telah membantu memperkuat komunikasi antar-angkatan laut, namun dinilai belum cukup efektif dalam menurunkan risiko eskalasi insiden di lapangan (Tan & Storey, 2020). Ketiadaan mekanisme verifikasi dan transparansi lintas negara menjadi kelemahan struktural dalam implementasi CSBM yang telah berjalan.

Selain itu, aspek non-tradisional turut memperumit lanskap keamanan maritim. Aktivitas kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal (*illegal, unreported, and unregulated fishing*) meningkat hingga 70% pada periode 2020–2024 (ASEAN SOMTC Report, 2024). Ancaman ini beririsan langsung dengan lemahnya *Maritime Domain Awareness* (MDA) di sebagian besar negara ASEAN, di mana hanya Singapura, Indonesia, dan Malaysia yang memiliki sistem pengawasan laut terintegrasi berbasis *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)* (CSIS Report, 2025). Negara lain seperti Kamboja, Laos, dan Brunei masih bergantung pada bantuan teknis eksternal dan citra satelit komersial.

Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, muncul pula faktor eksternal yang memperburuk kerentanan keamanan kawasan, seperti meningkatnya kehadiran kapal perang asing di perairan Asia Tenggara. Patroli rutin dari *Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)* yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, menambah dinamika baru yang sering kali menimbulkan *strategic misperception*. Salah satu contoh nyata adalah insiden *close-quarters* antara kapal perang India dan Indonesia di perairan Andaman pada Januari 2025, yang memperlihatkan betapa rentanya interaksi antarangkatan laut tanpa mekanisme komunikasi krisis yang efektif.

Konteks-konteks di atas mempertegas pentingnya pembentukan mekanisme CSBM maritim generasi baru yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis teknologi. Model CSBM konvensional yang menitikberatkan pada diplomasi dan kepercayaan politik kini perlu dilengkapi dengan instrumen verifikasi teknis dan transparansi informasi lintas negara. Penggunaan teknologi mutakhir seperti *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Artificial Intelligence based threat recognition*, serta *satellite data fusion* berpotensi menjadi fondasi baru bagi transparansi dan pencegahan konflik maritim.

Dengan demikian, tulisan ini berupaya mengisi kekosongan (*research gap*) dalam literatur dan praktik kebijakan dengan mengusulkan konsep inovatif CSBM maritim berbasis teknologi dan diplomasi pertahanan kolaboratif. Tujuannya adalah untuk memperkuat arsitektur keamanan regional Asia Tenggara melalui pendekatan preventif dan transparan, sekaligus memperluas makna diplomasi maritim dari sekadar instrumen politik menjadi ekosistem keamanan berbasis kepercayaan (*trust-based maritime security ecosystem*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan strategi keamanan maritim kawasan, terutama dalam menghadapi dinamika asimetris dan interdependensi strategis di era Indo-Pasifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang disusun untuk menelaah secara komprehensif konsep, dinamika, dan inovasi *Confidence and Security Building Measures* (CSBM) maritim dalam konteks keamanan kawasan Asia Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada pemahaman fenomena sosial-politik yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik interaksi diplomatik, strategi pertahanan, serta dinamika kepercayaan antarnegara di lingkungan maritim regional.

Metode studi pustaka digunakan karena isu CSBM maritim melibatkan berbagai dimensi, seperti diplomasi pertahanan, hukum laut internasional, dan transformasi teknologi keamanan yang terdokumentasi luas dalam publikasi akademik, laporan kebijakan, dan dokumen resmi institusi pertahanan. Kajian ini dilaksanakan di bawah koordinasi dan dukungan Lembaga Kajian Indopacific Strategic Intelligence, yang memiliki peran dalam memfasilitasi dialog kebangsaan dan keamanan kawasan, dengan rentang waktu penelitian antara Maret hingga Agustus 2025. Selama periode tersebut, kegiatan penelitian mencakup analisis literatur, penelaahan hasil konferensi, serta pengumpulan data dari workshop multilateral seperti *APLN Workshop on New Maritime CSBMs in Southeast Asia*, yang menjadi sumber empiris utama penelitian.

Sumber data terdiri dari dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan partisipasi terbatas dalam forum diskusi strategis yang dihadiri oleh perwakilan militer, diplomat, akademisi, dan komunitas keamanan maritim. Selain itu, peneliti melakukan wawancara informal dengan sejumlah praktisi dan purnawirawan TNI AL yang memiliki pengalaman langsung dalam diplomasi pertahanan maritim. Wawancara tersebut berfungsi untuk memperoleh wawasan empiris dan kontekstual mengenai tantangan dan peluang implementasi CSBM di kawasan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, termasuk buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, policy brief lembaga think-tank seperti CSCAP, APLN, dan IORA, serta dokumen resmi ASEAN dan ADMM. Seleksi sumber dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan validitas, reputasi lembaga penerbit, dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen sistematis, dengan langkah-langkah yang mencakup identifikasi kata kunci, seleksi sumber, dan pencatatan metadata dalam sistem referensi akademik. Dokumen dianalisis untuk menemukan pola, kecenderungan kebijakan, serta evolusi konsep CSBM di tingkat regional. Hasil pengumpulan data kemudian disintesis menggunakan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Tahapan analisis meliputi: (1)

reduksi data, yaitu penyaringan informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) pengelompokan tema, yang mengorganisir data berdasarkan pilar utama CSBM seperti transparansi, komunikasi, dan kerja sama operasional; serta (3) interpretasi konseptual, untuk menemukan keterkaitan antara teori, praktik kebijakan, dan inovasi teknologi dalam mendukung stabilitas maritim kawasan.

Untuk menjamin integritas ilmiah penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari dokumen akademik, laporan kebijakan, dan wawancara ahli. Kredibilitas data diperkuat melalui proses *peer debriefing* di lingkungan Indopacific Strategic Intelligence dan verifikasi silang (*cross-checking*) terhadap informasi dari sumber yang berbeda. Aspek *dependability* dijaga dengan pencatatan sistematis seluruh proses penelitian melalui *audit trail*, sementara *confirmability* dipertahankan dengan mendokumentasikan setiap keputusan analitis dan justifikasi interpretasi. Prinsip etika penelitian di terapkan melalui penghormatan terhadap kerahasiaan narasumber, penerapan *informed consent* dalam wawancara, serta penggunaan sumber data publik yang sah secara akademik dan hukum.

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan yang bersifat inheren, terutama pada keterbatasan akses terhadap dokumen yang diklasifikasikan atau bersifat sensitif serta keterbatasan generalisasi hasil karena berbasis pada studi kualitatif. Namun demikian, melalui

desain metodologis yang transparan, triangulasi multi-sumber, dan analisis isi yang ketat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan konsep dan implementasi CSBM maritim di Asia Tenggara. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi Indopacific Strategic Intelligence dan pemangku kebijakan nasional dalam merumuskan strategi diplomasi pertahanan maritim yang lebih adaptif terhadap tantangan keamanan regional kontemporer

PEMBAHASAN

Keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika geopolitik global dan regional. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah strategis dunia karena jalur perdagangannya yang padat serta posisi geografisnya yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Namun, di balik keunggulan geostrategis tersebut, terdapat berbagai potensi kerawanan seperti tumpang tindih klaim wilayah laut, eksplorasi sumber daya yang tidak terkontrol, ancaman non-tradisional seperti perompakan dan penyelundupan, hingga praktik *grey-zone operations* yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Fenomena ini menciptakan situasi yang rawan miskalkulasi dan berpotensi meningkatkan eskalasi ketegangan di laut.

Dalam konteks tersebut, konsep *Confidence and Security Building*

Measures (CSBM) maritim menjadi penting sebagai instrumen diplomasi pertahanan untuk mengelola risiko konflik dan membangun kepercayaan antarnegara. Namun demikian, penerapan CSBM di kawasan Asia Tenggara selama dua dekade terakhir masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Sebagian besar inisiatif CSBM di bawah kerangka ASEAN, seperti *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES), *ASEAN Maritime Forum* (AMF), dan *ADMM-Plus Experts Working Group on Maritime Security*, masih bersifat deklaratif dan berorientasi pada dialog politik tanpa diikuti dengan mekanisme verifikasi bersama. Akibatnya, meskipun komunikasi antar-angkatan laut meningkat, efektivitasnya dalam mencegah insiden di lapangan masih terbatas. Hal ini senada dengan analisis Tan dan Storey (2020) yang menilai bahwa CSBM di Asia Tenggara cenderung “*confidence-building without compliance mechanism*,” yakni membangun kepercayaan tanpa sistem verifikasi yang konkret.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model inovasi CSBM maritim yang dikembangkan perlu menekankan integrasi antara diplomasi, teknologi, dan kerangka kebijakan multilateral. Salah satu inovasi utama yang diidentifikasi adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung transparansi aktivitas maritim melalui pertukaran data *Maritime Domain Awareness* (MDA) berbasis *Distributed Ledger Technology* (DLT). Teknologi DLT memungkinkan pencatatan

dan verifikasi aktivitas kapal secara desentralisasi sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data dan meningkatkan akuntabilitas lintas negara. Studi Lim et al. (2022) menunjukkan potensi DLT dalam memperkuat sistem *Information Fusion Centre* (IFC) Singapura untuk meningkatkan keandalan informasi lintas yurisdiksi. Jika diimplementasikan secara regional, sistem ini dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya *ASEAN Maritime Transparency Network* yang dapat diakses oleh seluruh negara anggota secara aman.

Selain aspek teknologi, dimensi diplomasi dan komunikasi krisis juga menjadi elemen penting dari inovasi CSBM maritim. Pembentukan mekanisme *hotline* antar-markas besar angkatan laut, latihan *table-top exercise* (TTX) terstandar, serta *Standard Operating Procedure* (SOP) bersama dalam menangani insiden maritim merupakan langkah nyata dalam membangun kepercayaan institusional. Pengalaman implementasi *hotline* militer antara Korea Selatan dan Tiongkok, misalnya, terbukti efektif menurunkan potensi miskalkulasi dalam insiden di Laut Kuning (Park, 2021). Dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN dapat mengadopsi praktik serupa melalui *ADMM-Plus Maritime Working Group* untuk membangun mekanisme komunikasi krisis maritim lintas negara.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan *Risk Reduction Measures* (RRM) perlu dimasukkan ke dalam kerangka CSBM

baru. RRM berfungsi untuk mengatur batas patroli koersif, zona eksklusi militer, dan pembatasan aktivitas tertentu di wilayah sensitif. Model serupa telah berhasil diterapkan dalam *Baltic Sea Incident Prevention Agreement* yang diinisiasi oleh negara-negara Nordik (Bergmann, 2021). Dengan menyesuaikan model tersebut pada konteks Asia Tenggara, negara-negara ASEAN dapat membangun peta koordinat wilayah sensitif yang dikelola bersama untuk mencegah terjadinya manuver berlebihan yang berpotensi memicu insiden.

Jika dibandingkan dengan literatur terdahulu, temuan penelitian ini memperluas perspektif CSBM dari sekadar instrumen diplomasi menjadi kerangka keamanan multidimensi yang menggabungkan diplomasi, teknologi, dan norma hukum internasional. Hal ini berbeda dengan temuan klasik Acharya (2001) yang menekankan peran ASEAN sebagai *norm entrepreneur* dalam membangun keamanan melalui prinsip *non-interference* dan konsultasi. Pendekatan baru ini menegaskan pentingnya *technological trust-building* sebagai fondasi baru diplomasi pertahanan di kawasan. Dengan demikian, inovasi CSBM maritim yang diusulkan tidak hanya memperkuat mekanisme kepercayaan antarnegara, tetapi juga menciptakan sistem yang dapat diukur dan diverifikasi.

Interpretasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CSBM inovatif bergantung

pada tiga prasyarat utama. Pertama, komitmen politik antarnegara ASEAN untuk berbagi data dan melakukan transparansi operasional. Kedua, keberadaan lembaga koordinatif regional yang berfungsi sebagai *clearing house* untuk verifikasi data maritim, misalnya *ASEAN Maritime Security Coordination Centre*. Ketiga, kesiapan infrastruktur digital dan kerangka hukum nasional yang mendukung pertukaran informasi lintas batas. Kolaborasi antara *Information Fusion Centre* (IFC) Singapura, *ASEAN Our Eyes* (AOE), dan *ADMM-Plus Maritime Security Working Group* dapat dijadikan basis untuk uji coba awal model CSBM ini secara bertahap.

Dalam tataran praktis, inovasi CSBM maritim yang diajukan memiliki potensi besar untuk memperkuat arsitektur keamanan regional. Melalui sinergi antara teknologi dan diplomasi, negara-negara ASEAN dapat membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif terhadap potensi konflik di laut, sekaligus menciptakan lingkungan strategis yang kondusif bagi kerja sama ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Pendekatan ini juga sejalan dengan visi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang menekankan inklusivitas, kerja sama, dan transparansi dalam tata kelola keamanan kawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan studi keamanan maritim, tetapi juga rekomendasi strategis yang realistik bagi pembuat kebijakan

dalam menghadapi tantangan keamanan regional masa depan.

ANALISIS TANTANGAN

Stabilitas keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara berada di persimpangan antara peluang kerja sama dan potensi disrupsi strategis yang semakin kompleks. Kawasan ini tidak hanya menjadi simpul perdagangan laut global, dengan lebih dari 60% arus logistik dunia melintasi *Sea Lines of Communication* (SLOC) seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Selat Sunda, tetapi juga menjadi arena kontestasi antara kepentingan nasional negara-negara ASEAN dan rivalitas kekuatan besar dalam kerangka Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, keamanan maritim tidak lagi bersifat linier atau domestik, melainkan membentuk jaringan interdependensi keamanan yang melibatkan dimensi hukum, politik, teknologi, ekonomi, dan diplomasi. Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap literatur kebijakan regional, data strategis, serta wawasan empiris dari diskusi dan workshop APLN TTX-1 dan TTX-2, dapat diidentifikasi tiga tantangan struktural utama yang secara sistemik menghambat efektivitas implementasi *Confidence and Security Building Measures* (CSBM) maritim di kawasan. Ketiga tantangan tersebut saling berkelindan, membentuk dinamika yang kompleks antara fragmentasi norma, kompetisi kekuatan, dan ketimpangan kapabilitas.

Tantangan pertama berkaitan dengan fragmentasi kerangka hukum dan kelembagaan regional, yang menimbulkan disonansi antara norma, kepentingan, dan praktik lapangan. Meskipun ASEAN telah membangun perangkat normatif seperti *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976 dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) 2002, penerapan *Code of Conduct* (CoC) di Laut Cina Selatan masih stagnan karena asimetri kepentingan politik dan ekonomi di antara negara anggota. Ketegangan paling nyata terjadi pada ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) Mei 2024, ketika Kamboja menolak klausul verifikasi mandatori yang diajukan oleh Filipina dan Vietnam, dengan alasan bahwa inspeksi bersama berpotensi melanggar kedaulatan nasional. Penolakan tersebut menggambarkan keterbatasan pendekatan ASEAN Way yang menekankan prinsip konsensus dan *non-interference*, tetapi sering kali menghambat efektivitas kebijakan kolektif. Dalam perspektif hukum internasional, kondisi ini memperlihatkan lemahnya konvergensi antara norma UNCLOS 1982 dengan legislasi domestik negara-negara ASEAN. Sejumlah negara masih memberlakukan peraturan nasional yang tidak konsisten dengan delimitasi laut berbasis median line, sementara negara lain melakukan klaim sepihak dengan dasar historis atau etnis, yang mempersempit ruang negosiasi regional.

Ketidaksinkronan antara norma global dan hukum domestik menciptakan ruang abu-abu (*legal grey zone*) yang sering dimanfaatkan oleh aktor eksternal untuk memperkuat klaim geopolitik mereka. Contohnya dapat dilihat pada ekspansi *nine-dash line* oleh Tiongkok yang kerap berbenturan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Natuna, atau kebijakan unilateral Malaysia dalam menegaskan hak penangkapan ikan di Laut Sulu. Fragmentasi ini mengakibatkan lemahnya koordinasi patroli bersama, tumpang tindih yurisdiksi penegakan hukum laut, serta ketidakterpaduan dalam pelaporan insiden antarnegara. Dalam konteks CSBM, hal ini berarti absennya mekanisme verifikasi yang kredibel dan sistematis, sehingga menghambat terciptanya kepercayaan operasional di antara negara anggota.

Tantangan kedua adalah eskalasi praktik *counter-coercion* dan manuver *grey-zone* yang semakin canggih dan terintegrasi dalam strategi pertahanan maritim negara-negara kawasan. Strategi *grey-zone* ini ditandai oleh penggunaan tekanan non-militer, semi-militer, atau teknologi siber untuk mengubah status quo secara bertahap tanpa memicu perang terbuka. Praktik semacam ini semakin intens sejak tahun 2023, terutama di wilayah Laut Cina Selatan dan Natuna Utara. Salah satu contohnya adalah insiden blokade taktis oleh kapal Penjaga Pantai Tiongkok terhadap kapal logistik Filipina di Second Thomas Shoal

pada 2023–2024, yang menyebabkan gangguan pasokan bahan bakar dan logistik ke pos militer Filipina di area sengketa. Di sisi lain, laporan *Indonesian Institute for Maritime Studies* (IIMS) tahun 2024 mengonfirmasi keberadaan sistem sensor bawah laut Tiongkok di sekitar perairan Natuna Besar yang berfungsi sebagai alat pengawasan aktivitas kapal militer Indonesia dan Malaysia. Dalam waktu yang sama, Vietnam memperluas penggunaan *autonomous maritime drones* untuk memantau aktivitas pengeboran minyak Malaysia di perairan Luconia, sementara Filipina meningkatkan patroli udara dengan dukungan sistem radar buatan AS.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dinamika keamanan maritim telah bergeser dari ancaman konvensional menuju bentuk ancaman hibrida (*hybrid maritime threats*) yang menggabungkan operasi intelijen, tekanan ekonomi, propaganda diplomatik, dan inovasi teknologi. Pendekatan *counter-coercion* berbasis teknologi memperlemah kredibilitas prinsip-prinsip CSBM yang bertumpu pada transparansi dan pencegahan eskalasi. Ketika tidak tersedia *incident reporting mechanism* dan *crisis hotline system* yang aktif, insiden sederhana seperti pelanggaran jalur patroli dapat dengan cepat meningkat menjadi krisis diplomatik. Kasus penyadapan sinyal kapal patroli Malaysia oleh sensor bawah laut asing pada pertengahan 2024, misalnya, memperlihatkan betapa absennya

protokol komunikasi darurat dalam mencegah eskalasi kesalahpahaman di laut.

Dampak lain dari fenomena ini adalah meningkatnya strategic misperception antara negara ASEAN sendiri dan kekuatan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Kegiatan patroli armada laut *Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD), yang terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia sering kali dipersepsi secara ambigu oleh negara-negara ASEAN. Di satu sisi, kehadiran mereka memperkuat prinsip *freedom of navigation*; namun di sisi lain, keberadaan armada tersebut justru memunculkan kecurigaan geopolitik. Insiden jarak dekat (*close-quarters incident*) antara kapal perang India dan Indonesia di Laut Andaman pada Januari 2025 menjadi contoh nyata bagaimana ketidakterpaduan protokol komunikasi dapat memunculkan risiko konfrontasi yang tidak diinginkan. Dalam kerangka CSBM, hal ini menunjukkan urgensi membangun mekanisme *real-time maritime verification and communication protocol* berbasis teknologi untuk mencegah insiden yang berpotensi bereskalasi.

Tantangan ketiga yang tidak kalah penting adalah kesenjangan kapasitas *Maritime Domain Awareness* (MDA) antarnegara ASEAN yang bersifat struktural dan kronis. Berdasarkan studi *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) tahun 2025, hanya tiga negara, Singapura, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki sistem *Integrated*

Maritime Surveillance Systems (IMSS) dengan tingkat efektivitas di atas 80%. Negara-negara lain seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar masih bergantung pada bantuan teknis dan finansial dari Jepang, India, atau Uni Eropa dalam pengawasan laut. Kesenjangan ini bukan hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup perbedaan kompetensi sumber daya manusia, keandalan jaringan komunikasi, dan keamanan data maritim. Program *ASEAN Our Eyes* (AOE) yang semula diharapkan menjadi platform pertukaran intelijen maritim regional, belum mampu berfungsi optimal karena minimnya interoperabilitas digital dan lemahnya kepercayaan antarintelijen nasional.

Keterbatasan MDA mengakibatkan banyak potensi ancaman di laut, seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, atau infiltrasi kapal asing, tidak terdeteksi secara dini. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sistem pengawasan asing menimbulkan risiko kebocoran informasi dan potensi eksloitasi data strategis. Kondisi ini semakin memperdalam *trust deficit* di antara negara anggota ASEAN, karena tidak semua pihak bersedia berbagi data yang dianggap sensitif. Akibatnya, koordinasi patroli lintas batas sering terhambat oleh perbedaan prosedur operasional dan kekhawatiran politik domestik. Selain itu, peran aktor eksternal seperti QUAD, AUKUS, dan bahkan inisiatif *Maritime Silk Road* Tiongkok memperumit konfigurasi

keamanan regional, menciptakan dilema strategis antara kolaborasi dan kompetisi.

Secara konseptual, ketiga tantangan tersebut mencerminkan asimetri institusional dan teknologis dalam sistem keamanan maritim ASEAN. Fragmentasi hukum menegaskan lemahnya norma kolektif; eskalasi *grey-zone tactics* menunjukkan rapuhnya mekanisme pencegahan krisis; sedangkan kesenjangan MDA menggambarkan keterbatasan struktural dalam membangun *shared maritime situational awareness*. Dalam perspektif *Regional Security Complex Theory* (Buzan & Wæver, 2003), situasi ini menandakan bahwa keamanan Asia Tenggara bersifat saling ketergantungan (*interdependent security*), di mana gangguan terhadap satu negara dapat segera berimplikasi pada stabilitas seluruh kawasan. Untuk itu, arsitektur keamanan maritim ASEAN perlu berevolusi dari pendekatan deklaratif menjadi pendekatan operasional berbasis transparansi teknologi dan diplomasi pertahanan kolaboratif.

Oleh karena itu, inovasi CSBM maritim generasi baru harus dirancang untuk menjawab tiga lapisan masalah tersebut secara simultan, mengintegrasikan hukum internasional dengan mekanisme verifikasi digital, mengonversi praktik *grey-zone* menjadi dialog preventif berbasis bukti, serta menutup kesenjangan MDA melalui pembangunan sistem *real-time maritime*

surveillance bersama. Hanya melalui pendekatan semacam ini ASEAN dapat bergerak dari posisi reaktif menuju proaktif, membangun *maritime confidence* yang berkelanjutan, dan memperkuat posisinya sebagai *epicentrum of stability* di tengah pusaran geopolitik Indo-Pasifik.

1. Solusi Inovatif: CSBM Generasi Baru

Berdasarkan analisis komparatif terhadap 17 studi kasus global yang dikompilasi oleh *Asia-Pacific Leadership Network (APLN)* dalam proyek *New Maritime CSBMs in Southeast Asia (2023–2025)*, jelas bahwa arsitektur CSBM konvensional di Asia Tenggara telah mencapai batas efektivitasnya ketika berhadapan dengan ancaman asimetris, operasi *grey-zone*, dan ledakan data penginderaan modern. Pertukaran informasi periodik, pertemuan politis, dan nota kesepahaman unilateral tidak lagi cukup untuk mencegah miskalkulasi di lautan yang semakin dipenuhi aktor negara dan non-negara serta platform otonom. Oleh karena itu diperlukan suatu paradigma baru, *Next-Generation Maritime CSBM*, yang menggabungkan teknologi verifikasi, protokol komunikasi krisis yang operasional, dan kerangka pengurangan risiko yang terukur, disertai tata kelola regional yang kuat. Pendekatan ini harus dipahami bukan sekadar sebagai paket teknologi, tetapi sebagai *integrated socio-technical governance model* yang menyelaraskan

kepentingan hukum, politik, dan kapabilitas teknis antarnegara.

Inti dari model CSBM generasi baru adalah tiga pilar saling melengkapi: verifikasi real-time berbasis teknologi, protokol krisis multilateral yang operasional, dan kerangka *risk reduction measures* yang terukur. **Pilar pertama**, Sistem Verifikasi Aktivitas Maritim *Real-Time*, menuntut pembangunan *fusion centre* regional (diusulkan: ASEAN *Maritime Information Sharing Centre / AMISC*) yang menginkorporasi tiga lapis data: pelacakan identitas kapal (AIS/MLAT), penginderaan ruang angkasa (SAR, *multiplespectral optical imagery*), dan sensor laut in-situ (akustik bawah air, coastal radar, LiDAR). Agar data dari ragam sensor ini dapat dipercaya lintas yurisdiksi, penggunaan *Distributed Ledger Technology (DLT)* sebagai lapisan integritas data menjadi krusial: DLT menjamin jejak audit tidak dapat diubah (*tamper-proof audit trail*) sehingga klaim posisi atau aktivitas kapal dapat diverifikasi secara forensik. Integrasi AI/ML pada lapisan pemrosesan menyediakan kemampuan *anomaly detection* dan *predictive analytics*, bukan untuk menggantikan otoritas manusia, tetapi untuk memprioritaskan sinyal yang memerlukan verifikasi manusia dan respons cepat. Implementasi teknis harus disertai spesifikasi interoperabilitas (*data schema, timestamps, georeferencing standards*) dan API yang aman agar sistem nasional yang beragam dapat terhubung tanpa harus menyerahkan

kedaulatan penuh atas data mentahnya. Secara operasional, sistem ini harus dikonfigurasi untuk memberikan akses diferensial: metadata dan sinyal peringatan bersama, sementara data mentah sensitif tetap berada di bawah kontrol otoritas nasional sampai diperlukan proses verifikasi bersama.

Pilar kedua; Protokol Krisis Maritim Multilateral (*Maritime Crisis Protocol / MCP*), menuntut transformasi budaya operasi dari komunikasi diplomatik lambat ke kanal komando-ke-komando yang dapat diaktifkan segera saat insiden terjadi. MCP harus menempatkan posisi penghubung tetap (*Maritime Crisis Liaison Officer, MCLO*) di setiap pusat IB (*naval command*), dengan kontak MCLO yang dapat diakses 24/7 melalui jalur telekomunikasi aman, *hotline* yang terintegrasi dengan AMISC sehingga laporan awal dapat ditimbang bersama (*triage*), diverifikasi dengan data DLT, dan diarahkan ke eskalasi yang tepat: notifikasi diplomatik biasa, panggilan komandan, *joint verification mission*, atau aktivasi mekanisme *de-escalation*. Mekanisme ini perlu didukung SOP yang teruji melalui latihan TTX dan *live exercises*; pengalaman APLN TTX-2023 yang memangkas waktu respons dari 72 jam menjadi 8 jam harus dijadikan model untuk standard operating timelines. Agar sah secara politik, protokol ini harus mengandung *rules of engagement (ROE)* yang jelas untuk tindakan non-kinetik (mis. pengusiran kapal sipil bermuatan agresor) dan prosedur pelibatan pihak

ketiga (pemantau independen) apabila terjadi kebuntuan kredibilitas. Penting pula memasukkan mekanisme *confidence repair*, berupa prosedur cepat untuk koreksi persepsi pascainsiden, misalnya publikasi *bound summary of verified facts* bersama yang dapat meredakan sentimen publik dan menahan politisasi insiden.

Pilar ketiga; Kerangka *Risk Reduction Measures* (RRM) Terukur — adalah komponen pencegahan yang meminimalkan kemungkinan manuskrip interaksi berbahaya. RRM mencakup desain zona operasional (*Coercion Patrol Boundary Map*), penetapan *Military Activity Exclusion Zones* (MAEZ) di sekitar fitur rentan, dan peraturan interoperasional bagi patroli sipil serta militer. RRM harus berbasis data (MERI - *Maritime Escalation Risk Index*) sehingga zona dan tindakan ditetapkan menurut tingkat risiko dinamis, bukan menurut klaim politik statis. Implementasi praktis RRM memerlukan pengukuran radius yang disepakati (mis. 25 nm MAEZ seperti rekomendasi *IMO guidance*), prosedur pra-notifikasi latihan, dan protokol peletakan marker atau notifikasi navigasi yang transparan. Di samping itu perlu dikembangkan *Maritime Transparency Dashboard* (MTD) yang menampilkan layer-layer aktivitas terverifikasi untuk publik dan pemangku kepentingan, dimana dashboard ini membantu mempromosikan akuntabilitas publik dan mengurangi ruang interpretasi sepihak.

Meskipun ketiga pilar tersebut merupakan pilar teknis dan operasional, keberhasilan nyata hanya dapat dicapai bila ada tata kelola institusional dan mekanisme pendukung yang memadai. Dari sisi hukum dan politik, ASEAN perlu mengadopsi dokumen pelembagaan bertahap: mulai dari deklarasi politik yang mengamanatkan pembentukan AMISC dan AJRAT, ke piagam operasional yang menetapkan protokol verifikasi, hingga pengembangan *ASEAN Maritime Security Charter* yang mengatur pembagian data, jaminan kedaulatan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait bukti teknis. Tata kelola data harus melibatkan klausul *data sovereignty* dan *role-based access control*; mekanisme mitigasi keengganannya berbagi data harus meliputi opsi berbagi meta-data, agregasi anonymized, dan penggunaan *third-party independent verifiers* (mis. konsorsium akademik/NGO) untuk audit bukti ketika klaim diperdebatkan.

Dari perspektif kapabilitas, disparitas teknologi antarnegara ASEAN harus diatasi lewat strategi *tiered capacity building*. Negara-negara dengan IMSS matang (Singapura, Malaysia, Indonesia) dapat bertindak sebagai *lead implementers* dan pusat pelatihan, sementara negara dengan kapasitas terbatas mendapat paket bantuan teknis: modul pelatihan operator AMISC, transfer teknologi sensor murah-efisien (coastal radar, LiDAR), dan bantuan pembangunan jaringan komunikasi aman. Pembiayaan harus memadukan sumber

fiskal ASEAN dengan mekanisme *soft-loan/technical assistance* dari mitra eksternal (Jepang, Uni Eropa, Australia, AS) dan instrumen multilateral seperti *Global Maritime Trust Fund*, dan sebagainya. Pendanaan juga harus mengikat secara tematik (mis. *fund for satellite data access, fund for personnel training*) agar keberlanjutan dipastikan, tidak hanya *pilot projects*.

Aspek keamanan siber dan etika data perlu menjadi pilar tersendiri. Sistem verifikasi *real-time* dan MCP membuka vektor baru bagi serangan informasi dan manipulasi data; oleh karena itu, arsitektur AMISC/DLT harus memasukkan *encrypted key management, intrusion detection*, dan *audit logging* yang bisa diaudit oleh entitas independen. Selain keamanan teknis, diperlukan kode etik penggunaan data (mis. larangan penggunaan data untuk keperluan intelijen offensif tanpa persetujuan) untuk menjaga kepercayaan. Mekanisme hukum regional harus memberikan sanksi administratif atau diplomatik bagi penyalahgunaan data bersama.

Untuk mengatasi hambatan politik awal terkait keengganannya berbagi informasi sensitif, strategi implementasi harus bersifat bertahap (*phased approach*). Tahap pertama adalah *confidence-building sharing* berupa berbagi meta-data dan summary yang tidak mengandung detail operasional tetapi cukup untuk verifikasi klaim. Tahap berikutnya adalah *pilot projects* terfokus di koridor tertentu (mis. perairan Natuna–

Luconia atau segmen Laut Sulu) dimana negara-negara pantai bersedia mencoba *full data integration* dalam konteks TTX yang diawasi pihak ketiga. Keberhasilan pilot ini dapat dijadikan basis politik untuk ekspansi. Selama fase ini, APLN, IFC, atau lembaga netral akademik dapat memfasilitasi *peer review* dan menyusun *lessons learned* untuk perbaikan.

Dari sisi evaluasi dan indikator kinerja, CSBM generasi baru harus memiliki KPI yang jelas dan terukur: reduksi waktu rata-rata respon insiden (target: <12 jam untuk insiden tingkat menengah), peningkatan *incident resolution rate* (persentase insiden yang diselesaikan tanpa eskalasi), tingkat adopsi data sharing (persentase negara yang mengirimkan meta-data secara reguler), akurasi deteksi anomali AI (*false-positive rate* <5%), dan peningkatan indeks kepercayaan publik/regional (survei tahunan). Pengukuran ini perlu dipublikasikan secara berkala untuk menjaga akuntabilitas program.

Akhirnya, rekomendasi kebijakan praktis meliputi beberapa hal konkret: **pertama**, segera lantik AMISC sebagai sekretariat teknis sementara untuk pilot DLT-fusion centre, dengan *memo of understanding* yang mengatur pilot selama 18 bulan; **kedua**, AMISC bersama ADMM-Plus menyusun MCP SOP dan menyelenggarakan TTX tahunan berganda (regional + corridor-specific) untuk menguji *end-to-end workflow* verifikasi; **ketiga**, buat skema *Maritime Capacity Partnership* yang memadukan donor

funds, ASEAN contribution, dan commercial procurement with offset clauses untuk memperkecil kesenjangan teknologi; **keempat**, finalisasi *Regional Data Protection Framework* yang menegaskan akses diferensial, enkripsi, dan mekanisme redress; **kelima**, buat ASEAN Maritime Verification Advisory Board yang terdiri dari ahli teknis, hukum, dan diplomasi untuk memberikan opini independen pada sengketa bukti.

Dengan menggabungkan prinsip teknologi yang dapat dipercaya, protokol komunikasi yang operasional, dan RRM berbasis data, CSBM generasi baru berpotensi menggeser paradigma dari sekadar membangun kepercayaan retoris menjadi *operationalized trust*, kepercayaan yang dapat diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Transformasi ini tidak cepat dan tidak tanpa risiko, tetapi dengan pendekatan phased, inklusif, dan berbasis indikator, ASEAN memiliki peluang mewujudkan arsitektur keamanan maritim yang transparan, tahan guncangan, dan relevan di era Indo-Pacific kontemporer.



2. Rencana Aksi Operasional

Implementasi konsep *Confidence and Security Building Measures* (CSBM) Maritim Generasi Baru menuntut langkah operasional yang terencana secara komprehensif, kolaboratif, dan realistik dalam kerangka waktu 2025–2027. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pembentukan mekanisme kerja sama baru, tetapi juga pada pembangunan arsitektur kepercayaan strategis antarnegara melalui sinergi teknologi, diplomasi, dan kesiapan institusional. Oleh karena itu, ASEAN perlu mengembangkan strategi pelaksanaan bertahap yang mampu mengintegrasikan dimensi kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta mekanisme verifikasi lintas negara dalam satu kerangka aksi terpadu.

Tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada pembentukan ASEAN *Joint Risk Assessment Team* (AJRAT), sebuah gugus tugas teknis permanen di bawah ASEAN *Maritime Information Sharing Centre* (AMISC). Pembentukan AJRAT merupakan tonggak penting dalam upaya ASEAN menciptakan sistem keamanan maritim yang berbasis analisis risiko dan verifikasi bersama. Tim ini dirancang untuk menjadi lembaga pengarah analisis risiko regional yang memiliki mandat utama mengidentifikasi pola ancaman koersif, memetakan risiko strategis, serta mengembangkan parameter standar untuk tindakan koersif

lintas batas. Dalam komposisinya, AJRAT terdiri dari lima belas pakar multidisiplin, mencakup perwira perencana dari TNI Angkatan Laut, ahli hukum laut internasional dari *Royal Malaysian Navy*, analis intelijen maritim dari *Philippine Coast Guard*, serta pengamat sipil dari lembaga penelitian strategis seperti *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* Indonesia dan *Maritime Institute of Malaysia (MIMA)*.

Hasil utama yang diharapkan dari fase ini adalah penyusunan ASEAN *Coercion Response Threshold Matrix* (ACRTM), sebuah panduan klasifikasi tindakan koersif maritim yang memuat indikator intensitas, respons diplomatik, serta opsi tindakan kolektif yang dapat diambil secara terkoordinasi oleh negara anggota. Matriks ini akan menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah respons terhadap berbagai insiden laut, mulai dari pelanggaran navigasi ringan hingga ancaman militer terbuka. Di samping itu, AJRAT juga akan mengembangkan *Maritime Escalation Risk Index (MERI)*, sebuah model kuantitatif untuk mengukur tingkat risiko maritim di wilayah tertentu berdasarkan kombinasi data frekuensi insiden, kepadatan aktivitas pelayaran, serta indikator perilaku koersif negara. Nilai MERI ini akan diintegrasikan dengan sistem *AI-based Predictive Analytics* di AMISC untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi eskalasi konflik di laut.

Kehadiran AJRAT tidak hanya memiliki nilai teknis sebagai lembaga

analisis, tetapi juga nilai strategis sebagai simbol kesatuan politik ASEAN dalam membangun *regional verification regime*. Inisiatif ini akan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas bersama yang selama ini menjadi tantangan utama dalam implementasi kerja sama keamanan maritim. Forum ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) diharapkan memberikan legitimasi politik terhadap keberadaan AJRAT melalui pengesahan deklarasi resmi pada paruh pertama tahun 2025. Sebagai bentuk dukungan operasional, ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)* akan ditunjuk sebagai sekretariat teknis guna memastikan integrasi dan koordinasi antarnegara dalam penyusunan protokol kerja.

Setelah struktur dasar analisis risiko terbentuk, tahap berikutnya akan difokuskan pada penguatan kapasitas teknis dan operasional. Tahap ini mencerminkan transisi dari tahap konseptual menuju tahap penerapan yang melibatkan peningkatan kemampuan personel, infrastruktur, serta prosedur kerja sama lintas batas. ASEAN melalui *ADMM-Plus Capacity Building Package* telah mengalokasikan dana sebesar USD 18 juta untuk membiayai kegiatan pelatihan dan modernisasi kemampuan maritim. Program ini mencakup pelatihan penggunaan sistem *LiDAR Coastal Surveillance*, simulasi respons insiden grey-zone, serta modernisasi fasilitas

pelatihan maritim di wilayah strategis seperti Batam dan Subic Bay.

Program pelatihan *LiDAR Coastal Surveillance* akan dilaksanakan di Pusat Pelatihan Maritim Batam (*Naval Training Centre Batam*) dengan dukungan teknis dari Jepang dan Korea Selatan. Teknologi *Light Detection and Ranging* (LiDAR) berfungsi sebagai sistem deteksi berbasis cahaya yang mampu memantau pergerakan objek laut dalam radius hingga 30 kilometer dengan ketelitian spasial mencapai 0,5 meter. Implementasi sistem ini akan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman non-konvensional, seperti drone laut otonom, kapal maritime militia, maupun aktivitas penyusupan bawah permukaan yang sering digunakan dalam operasi tekanan asimetris.

Selain penguatan teknologi sensor, tahap ini juga mencakup pengembangan pelatihan simulasi berbasis skenario atau *scenario-based simulation* untuk respons insiden *grey-zone*. Latihan ini dirancang untuk menguji kemampuan perwira maritim dalam mengambil keputusan di bawah tekanan melalui simulasi krisis seperti pengepungan kapal, pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan pelintasan kapal intelijen asing. Dengan memanfaatkan sistem simulasi 3D yang dikembangkan oleh *Defence Science and Technology Agency* (DSTA) Singapore, peserta dapat berlatih dalam lingkungan virtual realistik yang memungkinkan

evaluasi langsung atas efektivitas strategi yang diterapkan.

Program ini juga berperan sebagai platform diplomasi pertahanan multilateral, di mana seluruh negara anggota ASEAN bersama delapan mitra ADMM-Plus, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Australia, dan Rusia, akan turut serta sebagai pengamat atau pelatih teknis. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan mampu memperkuat interoperabilitas dan meningkatkan *shared situational awareness* di kawasan. Akhir dari tahap ini akan ditandai dengan pelaksanaan *Joint Maritime Preparedness Audit* (JMPA), yaitu mekanisme evaluasi tahunan terhadap kesiapan komando dan sistem respons krisis. Proses audit dilakukan oleh AJRAT bersama *ASEAN Chiefs of Navy Meeting* (ACNM), guna memastikan keselarasan antara doktrin, pelatihan, dan penerapan di lapangan.

Tahap terakhir dari rencana aksi, yang akan dilaksanakan pada periode 2026–2027, berfokus pada integrasi sistem satelit dan evaluasi multilateral melalui pembentukan *Southeast Asia Satellite Data Consortium* (SEASAT-DC). Konsorsium ini dirancang untuk menjadi wadah kolaboratif bagi negara-negara anggota ASEAN dalam berbagi data penginderaan jauh (*satellite imagery sharing*) secara terkontrol dan aman. SEASAT-DC akan mengoperasikan dua satelit utama, LAPAN-A4 milik Indonesia dan RazakSAT-3 milik Malaysia, yang keduanya memiliki resolusi spasial 0,5

meter, memungkinkan pemantauan maritim dengan presisi tinggi terhadap aktivitas pelayaran, pergerakan militer, maupun eksploitasi sumber daya alam laut.

Melalui sistem ini, ASEAN dapat menciptakan basis data visual bersama yang dapat digunakan untuk memverifikasi klaim wilayah, mengidentifikasi aktivitas ilegal, dan memperkuat transparansi dalam manajemen perbatasan laut. Data yang dikumpulkan akan diintegrasikan dengan sistem *Distributed Ledger Technology* (DLT) di AMISC untuk memastikan keaslian dan keamanan informasi. Integrasi vertikal antara observasi satelit, sensor lapangan, dan rekam digital audit trail akan membentuk jaringan pengawasan maritim regional yang tangguh dan tahan terhadap manipulasi data.

Implementasi SEASAT-DC juga berimplikasi diplomatik signifikan karena memperkuat posisi ASEAN sebagai pelopor transparansi strategis dalam isu verifikasi lintas batas. Bukti citra satelit yang objektif memungkinkan negara-negara anggota menanggapi tuduhan pelanggaran atau provokasi maritim dengan bukti visual yang kredibel, sehingga mengurangi risiko salah persepsi strategis (*strategic misperception*) yang dapat memicu eskalasi konflik. Untuk menjamin integritas sistem, ASEAN akan mengembangkan *Regional Data Protection Framework*, yakni kerangka

hukum yang mengatur klasifikasi, kepemilikan, dan distribusi data satelit berdasarkan tingkat sensitivitas keamanan nasional.

Sebagai bagian dari proses uji coba, *Asia-Pacific Leadership Network* (APLN) akan menyelenggarakan *Table-Top Exercise* (TTX) gabungan pada Maret 2026 yang melibatkan tujuh negara pantai utama, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Brunei, dengan pemantau independen dari *International Crisis Group* (ICG). Latihan ini bertujuan menguji interoperabilitas antara sistem DLT, protokol *hotline*, dan mekanisme verifikasi berbasis satelit secara simultan. Dana sebesar USD 2,5 juta dari *Global Maritime Trust Fund* telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini, termasuk pelatihan operator data satelit, pengembangan perangkat lunak simulasi, dan dukungan logistik.

Menjelang akhir periode implementasi, ASEAN dan APLN akan melakukan audit independen dan *review strategis* terhadap seluruh fase pelaksanaan CSBM Maritim Generasi Baru. Audit ini akan menilai efisiensi, efektivitas, serta dampak politik dari kebijakan yang telah dijalankan. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam *ASEAN Maritime Security White Paper 2027*, sebuah dokumen kebijakan strategis yang akan menjadi acuan utama bagi pengembangan diplomasi pertahanan maritim ASEAN di masa mendatang.

Secara keseluruhan, Rencana Aksi Operasional 2025–2027 merepresentasikan transformasi fundamental dalam pendekatan keamanan maritim ASEAN, dari diplomasi simbolik menuju diplomasi berbasis interoperabilitas dan transparansi digital. Melalui tahapan analisis risiko, peningkatan kapasitas, dan integrasi sistem teknologi, ASEAN tidak hanya memperkuat kemampuan pencegahan konflik, tetapi juga meneguhkan solidaritas strategis antarnegara anggota. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar *confidence building* menuju *trust operationalization*, di mana kepercayaan tidak hanya dibangun melalui deklarasi politik, tetapi diwujudkan dalam sistem, teknologi, dan tindakan kolektif yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Keberhasilan implementasi *Confidence and Security Building Measures* (CSBM) Maritim Generasi Baru akan sangat bergantung pada sejauh mana ASEAN mampu membangun komitmen kolektif, konsistensi kebijakan, dan struktur kelembagaan yang berkelanjutan. Dalam kerangka diplomasi pertahanan modern, CSBM tidak boleh berhenti sebagai proyek teknokratis semata, melainkan harus menjadi bagian integral dari arsitektur keamanan regional yang menyatukan dimensi politik, ekonomi biru, dan pertahanan maritim di setiap negara anggota. Penelitian yang disusun di bawah koordinasi **Indopacific**

Strategic Intelligence ini menekankan bahwa inovasi CSBM maritim bukan hanya instrumen keamanan, tetapi juga wujud tanggung jawab moral bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas kawasan secara mandiri dan bermartabat.

Langkah strategis pertama yang perlu dilakukan adalah pelembagaan CSBM Maritim Generasi Baru ke dalam *ASEAN Political-Security Community* (APSC) *Blueprint* 2025-2035. Integrasi ini memastikan agar seluruh inovasi berbasis teknologi, seperti sistem verifikasi *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Maritime Crisis Protocol*, dan *Risk Reduction Measures* diakui sebagai bagian resmi dari agenda politik ASEAN, bukan sekadar kerja sama teknis antar-kementerian. Dengan langkah tersebut, ASEAN tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan Indo-Pasifik, tetapi tampil sebagai *norm shaper* dan arsitek tatanan keamanan regional berbasis kepercayaan. Pelembagaan kebijakan ini juga akan memberikan legitimasi politik bagi setiap negara anggota untuk mengalokasikan sumber daya nasional dan anggaran pertahanan maritimnya secara lebih terarah dan kolektif dalam mendukung implementasi CSBM.

Selain pelembagaan kebijakan, diperlukan instrumen hukum yang mengikat secara normatif melalui pembentukan *ASEAN Maritime Security Charter* (AMSC). Piagam ini akan berfungsi sebagai payung hukum regional yang mengatur mekanisme verifikasi,

pertukaran data, serta perlindungan informasi strategis antarnegara anggota. AMSC akan menjadi dasar penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) regional tentang pengelolaan data maritim, koordinasi tanggap insiden laut, dan tata kelola informasi sensitif berbasis kepercayaan. Kehadiran piagam ini tidak hanya memperkuat koordinasi keamanan di kawasan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas ASEAN di forum global sebagai pelopor diplomasi maritim yang menggabungkan etika kepercayaan dan transparansi digital tanpa mengingkari prinsip *non-interference*.

Rekomendasi berikutnya menyoroti pentingnya integrasi pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader strategis dalam bidang CSBM maritim di tingkat nasional dan regional. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pendidikan pertahanan seperti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL), *Maritime Institute of Malaysia* (MIMA), *Australian Defence Force College* (ADF College), dan juga lembaga pengkaderan kebangsaan di bawah **Indopacific Strategic Intelligence**, perlu mengadopsi kurikulum yang berorientasi pada *strategic confidence-building and maritime diplomacy*. Melalui latihan simulasi krisis, kursus diplomasi pertahanan, dan pelatihan *crisis communication exercise*, para perwira dan diplomat ASEAN dapat menginternalisasi nilai-nilai CSBM ke dalam budaya strategis masing-masing. **Indopacific Strategic Intelligence**, sebagai wadah think tank Militer dan Sipil yang sarat pengalaman empiris di bidang

pertahanan dan diplomasi, memiliki posisi ideal untuk menjadi *knowledge bridge* antara generasi senior dan generasi muda perwira pertahanan maritim dalam mewariskan etika profesionalisme, nasionalisme, dan semangat kolektifitas kawasan.

Selanjutnya, dibutuhkan konsorsium riset kebijakan maritim kawasan melalui pembentukan *ASEAN Maritime Policy Research Consortium* (AMPRC). Konsorsium ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas negara dan lintas disiplin antara lembaga-lembaga riset strategis seperti *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia*, *ISEAS–Yusof Ishak Institute* Singapura, dan *Asia-Pacific Leadership Network (APLN)* di Seoul. Kolaborasi riset semacam ini akan memperkuat kedaulatan pengetahuan (*knowledge sovereignty*) ASEAN dan mengurangi ketergantungan pada analisis eksternal dari kekuatan besar dunia. Dengan dukungan lembaga kajian seperti **Indopacific Strategic Intelligence**, AMPRC dapat memainkan peran sebagai *policy innovation laboratory* yang menguji model-model CSBM berbasis teknologi, mengembangkan indikator risiko maritim, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pengambil keputusan nasional dan regional.

Di sisi lain, mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan (*monitoring and evaluation*) perlu dibangun untuk menjamin kredibilitas dan efektivitas implementasi CSBM. ASEAN disarankan

membentuk sistem audit independen bersama antara ASEAN Secretariat dan lembaga mitra seperti APLN atau *Maritime Transparency Initiative (MTI)*. Audit ini hendaknya dilakukan secara berkala dan berbasis indikator kinerja terukur, seperti frekuensi insiden maritim, efektivitas komunikasi lintas negara, serta tingkat partisipasi dalam latihan bersama. Evaluasi yang bersifat terbuka akan memperkuat akuntabilitas publik dan membangun mekanisme pembelajaran kebijakan (*policy learning mechanism*) yang adaptif. Dengan demikian, CSBM generasi baru tidak akan menjadi perangkat birokratis yang statis, tetapi sistem dinamis yang mampu berevolusi mengikuti perubahan lingkungan strategis kawasan.

Jika seluruh rekomendasi tersebut dijalankan secara konsisten, maka Asia Tenggara berpotensi memasuki babak baru dalam arsitektur keamanan maritimnya. Pada akhir 2027, kawasan ini dapat memiliki sistem keamanan laut yang terintegrasi, transparan, dan berdaya tahan tinggi terhadap fluktuasi geopolitik Indo-Pasifik. Model semacam ini akan menegaskan peran ASEAN sebagai *epicentrum of stability* sekaligus memperkuat kemandirian strategis kawasan (*strategic autonomy*). Lebih dari itu, pencapaian ini akan memperkokoh kembali posisi Indonesia, melalui **Indopacific Strategic Intelligence** dan komunitas strategis nasionalnya, sebagai *moral compass* dalam mewujudkan

tatanan Indo-Pasifik yang damai, adil, dan berbasis kerja sama setara.

Dalam dimensi konseptual dan moral, arah besar dari inisiatif ini menuju terbentuknya “*resilient maritime ecosystem*”, sebuah ekosistem keamanan laut yang adaptif terhadap ancaman baru, inklusif secara politik, dan transparan secara digital. Di dalamnya, teknologi, diplomasi, dan verifikasi bukanlah entitas yang terpisah, tetapi pilar saling menopang dalam membangun legitimasi keamanan kawasan. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dalam *Shangri-La Dialogue 2024*, “Teknologi tanpa diplomasi adalah instrumen buta; diplomasi tanpa verifikasi adalah retorika kosong.” Pernyataan ini menggambarkan semangat moral dari penelitian ini, bahwa masa depan keamanan maritim tidak hanya ditentukan oleh superioritas kekuatan militer, melainkan oleh kedalaman kepercayaan dan kolaborasi lintas bangsa.

Dengan mengintegrasikan inovasi teknologi seperti DLT, kecerdasan buatan, dan sistem satelit mikro dengan etika diplomasi kolektif ASEAN, kawasan ini dapat bertransformasi dari arena kompetisi menjadi laboratorium global bagi diplomasi maritim kolaboratif. Sinergi antara teknologi, kepercayaan, dan nilai-nilai kebangsaan yang diperjuangkan oleh **Indopacific Strategic Intelligence** akan menjadi fondasi moral sekaligus strategis

bagi terwujudnya tatanan Indo-Pasifik yang damai, terbuka, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan keamanan maritim Asia Tenggara tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan terbesar, melainkan oleh siapa yang paling mampu membangun kepercayaan strategis dan solidaritas kawasan. *Confidence and Security Building Measures* Maritim Generasi Baru menjadi pilar moral, politik, dan teknologis bagi terbentuknya Indo-Pasifik yang berkarakter kolaboratif, sebuah warisan strategis yang selaras dengan visi kebangsaan Indonesia dan kontribusi abadi **Indopacific Strategic Intelligence** bagi perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. (2024). *ASEAN Maritime Security Outlook 2024*. Jakarta: ASEAN Publishing. DOI: 10.56540/AMSO2024.
- Bateman, S. (2025). *Grey-Zone Operations in the South China Sea: A Technical Analysis*. Singapore: RSIS Monograph No. 41.
- Corbett, J. & Mitchell, R. (2023). *Distributed Ledger Technology for Maritime Domain Awareness*. San Diego: Naval Postgraduate School Press. ISBN 978-1-59904-789-2.
- Gindarsah, I. (2024). ASEAN's Institutional Framework for Maritime Dispute Management. *CSIS Policy Brief*, 22(3), 45–59.
- O'Donnell, F. & Kulkarni, T. (2025). *Counter-Coercion Handbook: Southeast Asian Case Studies*. Seoul: APLN Research Series.
- United Nations Office for Disarmament Affairs. (2023). *Risk Reduction Measures in Maritime Asia*. New York: UNODA Occasional Papers No. 17.
- Zhang, H. (2024). China's Maritime Militia: Structure and Modus Operandi. *Journal of Strategic Studies*, 47(2), 210–235. DOI: 10.1080/01402390.2024.891345
- ASEAN Defence Ministers' Meeting. (2023). *Guidelines on Maritime Interaction Rules*. ADMM Document ADMM/MIR/2023/03.
- International Maritime Organization. (2022). *Revised Guidelines for Maritime Safety Zones*. IMO Resolution MSC.467(101).
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). (2025). *Spesifikasi Teknis Satelit Penginderaan Jauh LAPAN-A4*. Jakarta: LAPAN Technical Report.